
Pemberdayaan Kelompok Ternak Kambing “Satwa Makmur” Melalui Program CSR PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan

Ahmad Kharis
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
Email : kharisa4@gmail.com

Mutrofin
UIN Sunan Kalijaga
Email: rofin.hegel@gmail.com

Abstract

This article will examines the implementation of partnerships between corporations and community groups through the CSR empowerment program of PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B in Tubanan Village. This study used a descriptive qualitative approach. The data source from field studies, observations, interviews and theoretical research studies that has been done and relevant to the problems raised. The research shows that there are two patterns in increasing community empowerment it's by increasing human capacity and increasing environmental capacity. Through this paper, it will be very useful to understand how to empower communities through livestock groups and foster motivational empowerment for increasingly of social welfare.

Keyword : corporate social responsibility; partnership; empowerment; livestock group

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan kemitraan antara korporasi dengan kelompok masyarakat melalui program pemberdayaan CSR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B di Desa Tubanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diambil dari studi lapangan, observasi, wawancara serta kajian teoritis dengan penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan permasalahan yang dikemukakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada dua pola dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, yaitu melalui peningkatan kapasitas manusia dan peningkatan kapasitas lingkungan. Melalui tulisan ini akan sangat berguna untuk memahami bagaimana cara memberdayakan komunitas melalui kelompok ternak dan menumbuhkan motivasi pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

Keyword : Corporate Social Responsibility; Partnership; Empowerment; Livestock Group



Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa multikultur yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.¹ Dengan populasi penduduk yang padat, Indonesia tidak bisa membangun bangsa tanpa ada campur tangan pihak lain. Berbagai pihak perlu upaya serius untuk memulai rencana intervensi melalui program pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, swasta (perusahaan), dan masyarakat adalah tiga pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan pembangunan tersebut.

Ketiga pihak ini harus bersama-sama membangun bangsa. Pembangunan dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat secara implementatif. Program ini merupakan salah satu upaya memberikan daya, kekuatan, ilmu pengetahuan, kebebasan hak individu, dan kewajiban personal manusia. Hasil dari aktivitas ini dapat menghasilkan *sharing knowledge* yang berdampak kemandirian. Kemandirian tersebut dapat dicapai apabila masyarakat mampu merubah cara berpikir, bertindak, dan kemampuan mengendalikan potensi yang miliknya. Selaras dengan pendapat Widjajanti, pemberdayaan merupakan proses pemberian kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap individu. Dengan identifikasi, masalah yang dihadapi setiap individu, sekurang-kurangnya mampu diselesaikan secara personal.²

Namun begitu, program pemberdayaan harus sesuai dengan aturan dan strategi percepatan pembangunan daerah. Sebagaimana UU no. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, strategi pembangunan harus selaras dengan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat. Penguatan ini dapat membuka ruang inisiatif masyarakat untuk mengembangkan budaya kemandirian. Secara tidak langsung, masyarakat yang mandiri dapat

¹ Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia," Databoks, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>.

² Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 1 (2011): 15, <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>.

meningkatkan kapasitas diri untuk mendayagunakan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengelola potensi sosial-budaya sebagai modal peningkatan sumber pendapatan. Dengan begitu, perpaduan antara peningkatan kualitas sumber daya alam dengan pengembangan individu dapat menghasilkan potensi pemberdayaan yang unggul.

Salah satu daerah yang berhasil menggabungkan kedua potensi di atas adalah Desa Tubanan. Desa ini sangat potensial diberdayakan karena memiliki aset alam yang eksotis. Kawasan desa yang secara mayoritas penduduknya bekerja sebagai peternak kambing. Kegiatan beternak kambing yang dilakukan warga Desa Tubanan menjadi salah satu cara *saving money* selain di bank dan koperasi. Menurut data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara tahun 2015 menjelaskan bahwa jumlah ternak kambing di Jepara berjumlah 68.287 ekor. Data spesifik kecamatan menyebutkan bahwa Kecamatan Kembang memiliki jumlah ternak kambing terbanyak sebesar 7.359 ekor di tahun 2017.³ Maka, sumber daya alam yang dimiliki Desa Tubanan, sebagai bagian dari Kecamatan Kembang, dapat mengolah ternak kambing menjadi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

Potensi sumber daya alam ini, akhirnya, dimanfaatkan masyarakat dengan membentuk kelompok “Satwa Makmur”. Menariknya, kegiatan beternak kambing memunculkan siklus ekonomi baru. Siklus ini dimanfaatkan masyarakat dengan membangun lahan untuk menanam rumput gajah. Tanaman dimanfaatkan untuk pakan kambing. Hasil tanaman diolah menjadi sumber ekonomi baru dengan proses jual-beli pakan ternak. Kegiatan ini menghasilkan transaksi ekonomi antara penyedia dengan pembeli rumput.

Proses transaksi, selaras dengan teori rembesan (*trickle down effect*), menjadi model ekonomi baru yang berkembang diantara para pelaku usaha

³ Badan Pusat Statistik, ‘Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Jepara’ (Jepara, 2017) <<https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2017/03/01/476/tabel-table-5-4-1-populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-jepara-2015.html>>.

ternak kambing.⁴ Alhasil, strategi pembangunan dibidang peternakan mempunyai prospek yang cerah. Sebab, populasi penduduk Indonesia akan semakin besar sehingga jumlah kebutuhan daging kambing juga akan meningkat. Selain itu, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, salah satunya mengkonsumsi daging kambing. Hal ini menjadi modal bagi pegiat peternakan untuk bekerja lebih keras. Hal ini sebagai dampak kebutuhan konsumsi konsumen dan memenuhi pesanan pasar. Apalagi pertumbuhan usaha restoran yang bahan bakunya kambing semakin banyak disudut perkotaan.

Kondisi ini menjadi peluang besar bagi peternak kambing. Namun peternak kambing di Desa Tubanan memiliki kendala dalam pengembangan usaha mereka. Kendala tersebut menjadi ganjalan untuk memajukan usaha yang ditekuninya. Salah satu kendala yang muncul adalah komoditas pangan yang belum berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas, daya, dan pengetahuan para peternak untuk mengelola sentra peternakan secara terpadu. Sentra peternakan menjadi unsur penting untuk mengembangkan model usaha. Upaya pengembangan harus mengarah kepada pembangunan kandang komunal. Kandang model ini perlu juga memperhatikan aspek ergonomis dan estetik. Sebab, kondisi tersebut merupakan proses pengelolaan usaha secara terpadu. Proses ini dapat dimulai dengan penggemukan kambing, pemanfaatan pembuatan biogas dari kotoran ternak, jaringan pemasaran produk, dan teknologi pakan ternak. Selain itu, penciptaan sentra edu-wisata ternak kambing harus dimanfaatkan secara optimal. Salah satu yang dapat dibangun adalah membentuk lembaga organisasi masyarakat secara profesional.

Setelah itu, potensi lain yang perlu dilaksanakan adalah membangun sinergitas antara *stakeholder* organisasi profesional dengan pemerintah daerah. Sinergi ini dapat menjadi pendongkrak majunya sebuah usaha. Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, peternakan kambing masyarakat

⁴ Pajar Hatma Indra Jaya, "Trickle Down Efeck dan Perubahan Wajah Masjid di Yogyakarta," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 1-24, <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V12I1.1-24>.

bisa berhasil. Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan dapat menjadi katalisator pemasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjadi penghubung dengan dinas kesehatan yang memiliki alat produksi perawatan hewan ternak. Maka dari itu, berbagai stakeholder dapat bekerjasama dengan memprioritaskan kebutuhan akses produksi peternakan hewan ternak kambing.

Menurut *The Kian Wie* dalam Asniwati, kemitraan merupakan kerjasama usaha yang bergerak dalam bidang produksi yang saling menguntungkan. Hal ini dapat terwujud jika pembinaan dan pengembangan masyarakat memenuhi prinsip saling menguatkan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat-sifat tujuan usaha. Kemitraan ini, selain untuk mendapatkan keuntungan usaha, juga sebagai jalinan untuk mempertahankan citra baik antar kedua belah pihak.⁵

Pola kemitraan dapat dibentuk jika semua unsur sudah terlibat aktif. Aktivitas kemitraan terlihat aktif apabila ada kinerja yang sinergis antara pihak pemerintah dengan swasta. Sinergi ini diwadahi melalui pengembangan kapasitas individu maupun kelompok. Dengan begitu, upaya pemerintah dan swasta (perusahaan) untuk membangun masyarakat sudah terjalin di Desa Tubanan. Jalinan kedua belah pihak ini dinamakan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR ini adalah program PT. PLN (Persero) yang juga perusahaan milik negara (BUMN). Sementara itu, Desa Tubanan merupakan zona merah perusahaan karena berdekatan langsung dengan Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Zona ini berada pada radius satu kilometer dari pembangkit listrik milik PLN.

Kawasan yang jaraknya sangat dekat dengan pembangkit listrik dapat berdampak pada kebisingan saat penyedotan air laut, udara sekitar yang semakin panas, dan debu yang ditimbulkan mengganggu polusi udara. Namun, menurut penelitian Puspitaningtyas (dkk) dan Novia, lokasi perusahaan yang berdampak negatif bagi masyarakat harus memperhatikan

⁵ Besse Asniwati, "Evaluasi Pelaksanaan Cooperative Sosial Responsibility CSR PT. Pupuk Kaltim", *Jurnal Eksis* 6, no. 1 (2010), hal. 12.

unsur-unsur kehidupan yang berkelanjutan. Dampak ini harus diubah mekanisme pembangunannya. Perusahaan tidak hanya sibuk mengeruk sumber daya alam. Namun perusahaan perlu merubah *mindset* negatif tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalankan program pembangunan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan aturan negara yang tertuang dalam UU no. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mengamanatkan perusahaan untuk menjalankan program CSR.⁶

Program tersebut merupakan wujud kepekaan sosial perusahaan untuk mengimplementasikan konsep *triple bottom line*, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people*), pelestarian lingkungan (*planet*), dan memperhatikan pendapatan perusahaan (*profit*).⁷ Tujuan akhirnya adalah meminimalisir dampak maupun resiko yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Melalui program ini, CSR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, berusaha membantu masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kelompok ternak kambing. Selain itu, program CSR tersebut berupaya untuk mengembangkan wawasan berbasis lingkungan sebagai wujud kemitraan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat.

Berdasarkan peta masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B terhadap kelompok ternak kambing di Desa Tubanan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya terdahulu yang berhubungan dengan studi ini. Namun yang secara spesifik mengkaji mengenai kemitraan korporasi PT PLN (Persero) Unit Induk

⁶ Zarah Puspitaningtyas, Oktavia Dwi Lestari, dan Aryo Prakoso, "Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016," *Ekspektra : Jurnal Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2018): 89, <https://doi.org/10.25139/ekt.v2i1.700>; Novia Marwah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Mandiri Bersama Bank Mandiri di Mrican Umbulharjo," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 109-28, <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-06>. biaya kemitraan, dan biaya bina lingkungan, sedangkan profitabilitas diprosikan ke Return On Assets (ROA

⁷ J. Brejning, *Corporate Social Responsibility and the Welfare State: The Historical and Contemporary Role of CSR in the Mixed Economy of Welfare* (Farnham: Ashgate Publishing Company, 2012).

Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok ternak kambing Desa Tubanan belum ditemukan. Menurut alasan inilah, peneliti dapat menyebutkan bahwa kajian ini masih orisinal dan perlu dikaji secara mendalam.

Untuk menguji kajian ini secara mendalam, peneliti membutuhkan alat analisis sebagai kerangka *framework*. Kerangka ini dibutuhkan untuk menguji kebenaran ilmiah pada artikel yang peneliti tulis.⁸ Untuk itu, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan sebagai pendekatan kebenaran ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan kriteria informan. Kriteria ini dilihat dari keterlibatan masyarakat yang menjadi anggota kelompok ternak kambing, pemerintah setempat, dan perusahaan. Data diambil dari studi lapangan melalui proses observasi dan wawancara. Sementara itu, kajian teoritis digunakan untuk membedakan masalah yang relevan dengan masalah yang diangkat. Selanjutnya, data yang terkumpul divalidasi dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Pemberdayaan Melalui Pembentukan Kelompok

Pemberdayaan mempunyai pengertian yang cukup luas dan dinamis. Secara konseptual, pemberdayaan membahas tentang individu dan kelompok yang memiliki relasi untuk mengontrol kualitas hidup kearah yang lebih baik. Sementara kontrol hidup tidak dapat dicapai apabila cita-cita individu dan kelompok belum memiliki strategi yang mapan. Karena itu, proses pemberdayaan memiliki kedekatan konsep dengan kemandirian. Hal ini bisa diperkuat melalui program yang menjadi isu utamanya pengentasan kemiskinan.⁹

Masalah pemberdayaan yang umumnya muncul adalah, siapa yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menjalankan sebuah

⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 173.

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 59.

program. Jika pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan struktural yang bersifat *top-down*, hal tersebut dapat memunculkan *gap* antara masyarakat dengan pemerintah. Akhirnya, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan karena tidak diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal semacam ini akan menimbulkan masyarakat yang hanya memiliki sifat ketergantungan.

Untuk menghindari sifat tersebut, maka pemerintah berupaya menjalin kemitraan dengan perusahaan (swasta) untuk menjalankan program kesejahteraan. Selain itu, perusahaan sebagai pihak swasta, memiliki kewajiban yang harus dijalankan melalui amanat UU tentang tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁰ Jadi dalam konteks ini, penting sinergitas antara pemerintah dengan korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan lingkungan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Menurut *Business for Social Responsibility* dalam Kartini, *Corporate Social Responsibility* adalah praktik pemberdayaan yang dilakukan korporasi secara akuntabel. Ini artinya, pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Selain itu juga menjunjung tinggi nilai etis untuk menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan sebagai institusi yang menjamin berlangsungnya operasional dengan baik, wajib menjaga keselarasan lingkungan dan meningkatkan kesempatan hidup masyarakat. Tindakan tersebut akan menjaga perusahaan dari persepsi masyarakat yang salah kaprah.¹¹

Dengan begitu, untuk menjamin keberlangsungan perusahaan di tengah kehidupan masyarakat, program pemberdayaan berbasis CSR dapat dikategorikan empat bagian. *Pertama*, program yang bersifat *charity*. Program ini merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat karitatif atau pemberian langsung secara cuma-cuma. Misalnya,

¹⁰ Erwin Syahputra dan Suteki Suteki, "Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018): 1–8, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.1-8>.

¹¹ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 2.

santunan anak yatim piatu, pemberian sembako kepada fakir miskin, dan pemberian nutrisi tambahan anak sekolah. *Kedua*, mendorong pembangunan *infrastructure*. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membangun Fasos (fasilitas sosial) dan Fasum (fasilitas umum). Contohnya, pembangunan puskesmas terpadu, perbaikan jalan raya, perbaikan tempat pendidikan, perbaikan saluran irigasi dan lainnya. *Ketiga*, peningkatan *capacity building* atau pelatihan yang bersifat implementatif. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Seperti halnya, pelatihan menjahit dan sulam, pelatihan teknik las, pelatihan produksi pupuk organik, dan lainnya. *Keempat*, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan *empowerment*. Kegiatan ini merupakan implementasi pemberdayaan yang secara fundamental untuk mengarahkan masyarakat menjadi mandiri secara berkelompok. Selain itu juga, mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan modal sosial, daya hidup, dan partisipasi sosial.¹²

Oleh karena itu, program CSR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B terlaksana dengan mengacu kepada konsep teoritis di atas. Implementasinya berupa pembentukan kelompok peternak kambing di Desa Tubahan, Jepara. Tentu saja, sebelum membentuk kelompok ternak, perusahaan membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan aktifitas bisnisnya dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan program CSR dapat dimanfaatkan kembali oleh perusahaan dan warga penerima bantuan program tersebut.¹³ Berikut ini pemaparan peneliti tentang implementasi pola kemitraan korporasi dengan komunitas yang telah dibangun berdasarkan fakta dilapangan.

¹² Nan Lin, *Social Capital A Theory of Social Structure and Action* (New York: Cambridge University Press, 2006), hal. 81-92.

¹³ Lin, hal. 93-94.

Pembentukan Kelompok Melalui Rutinitas Tahlilan dan Arisan

Kelompok ternak *Satwa Makmur* dibentuk sebagai upaya untuk mencari jawaban atas masalah yang muncul setiap individu (peternak) dalam menjalankan profesinya. Kondisi semacam ini terjalinan komunikasi yang baik melalui pertemuan rutin, yakni forum tahlilan dan arisan. Tujuannya untuk menemukan penyelesaian masalah yang mereka hadapi agar gairah beternak semakin tinggi. Tentu saja, kegiatan ini dapat menghasilkan *spirit* baru untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Tubanan.¹⁴ Tahlilan dan arisan ini, secara langsung, dapat menimbulkan ikatan emosional yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh kepercayaan dan partisipasi sosial dalam setiap pertemuan.

Tahlilan merupakan tradisi masyarakat dengan aktivitas *dzikir* secara bersama-sama oleh sekelompok orang. Sejumlah orang berkumpul, lalu membaca sejumlah kalimat (*thoyibah*)—*dzikir* secara langsung kepada Allah dengan kalimat “*Laa ilaaha illallah*” (tidak ada Tuhan selain Allah). Sebagai rutinitas, tahlilan dapat menciptakan ruang domestik baru di tengah pertemuan masyarakat. Selain itu, ruang domestik ini menjadi sarana untuk menyambung budaya kekerabatan (*silaturrohim*) dan kerukunan antar warga.

Kegiatan tahlilan juga memunculkan nilai positif untuk saling mengenal antar anggota kelompok dan secara langsung menciptakan relasi linier. Relasi ini menghasilkan *spirit* untuk berorganisasi. Hasil pengamatan peneliti, ketika mengikuti kegiatan pertemuan bulanan, para peserta datang dengan sukarela. Setelah berkumpul, peserta bercengkerama lalu tumbuh semangat untuk membangun dan mendirikan sebuah organisasi. Inilah awal mula berjalannya sebuah program pemberdayaan melalui program CSR PT. PLN. Kesadaran masyarakat, tanpa diintervensi oleh perusahaan, dengan sendirinya mampu mendirikan organisasi secara terstruktur dan baku.

Pertemuan rutin, tahlilan dan arisan, diikuti oleh laki-laki yang berusia kisaran 30 sampai 50 tahun ke atas. Tahlilan dan arisan ini dilakukan pada

¹⁴ Sukalim, Wawancara, 22 Maret 2019.

malam karena siang digunakan untuk bekerja. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki ini banyak yang bekerja di sektor informal, seperti tukang batu, pedagang, kuli bangunan, petani, peternak dan pekerja lepas perusahaan.¹⁵

Kegiatan tahlilan dan arisan merupakan rutinitas yang dilakukan kelompok ternak kambing Desa Tubahan sebelum mendirikan kelompok “Satwa Makmur”. Berdasarkan pengamatan, peneliti berpendapat bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan waktu malam hari di tempat salah satu anggota. Kejadiannya diawali ritual tahlilan dengan mengucap kalimat *thoyibah*. Setelah kegiatan selesai, dilanjutkan arisan dengan mengumpulkan uang iuran. Setiap pertemuan, setiap anggota wajib membayar arisan sebesar Rp. 5.000,-. Setelah seluruh anggota kelompok selesai membayar iuran, kegiatan lalu dilanjut dengan pemungutan kertas secara acak. Maksud dari kegiatan itu untuk menentukan lokasi pertemuan selanjutnya. Anggota kelompok yang terpilih akan dijadikan tuan rumah pada pertemuan bulan selanjutnya.¹⁶

Membangun Kemitraan dengan Membentuk Kelompok “Satwa Makmur”

Kelompok Ternak “Satwa Makmur” merupakan salah satu kelompok ternak kambing yang lokasinya berada di Dusun Nduren, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Dari kota Jepara ke arah utara kurang lebih hampir 20 KM menghabiskan waktu tempuh hingga 45 menit. Kelompok ternak ini berdiri sejak tanggal 3 Desember 2013. Awalnya, diinisiasi oleh Sujianto, Sukalim, Supri dan Hendro. Sekretariatnya berada di rumah Sdr. Supriyanto RT 01 RW 05 Desa Tubanan. Anggota kelompok ini warga asli Desa Tubanan yang sudah lama bergelut dengan dunia peternakan.

Kelompok ternak “Satwa Makmur” muncul di tengah-tengah masyarakat karena kesadaran bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,

¹⁵ Sukalim, Wawancara, 25 Februari 2019.

¹⁶ Sujianto, Wawancara, 20 Februari 2019.

saling bertukar informasi, dan kebutuhan spiritual bersama-sama. Selaras dengan pernyataan Sunyoto, “kedekatan orang secara fisik atau identitas sama belum dikatakan kelompok sosial meskipun saling berhubungan berulang dan teratur jika tidak mengendap kesadaran kolektif atas keanggotaannya.”¹⁷ Kelompok ternak “Satwa Makmur” mempunyai anggota warga asli Desa Tubanan.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, dana kas yang masuk dan dikelola sebesar Rp. 7.500.000,-. Anggaran yang dikelola digunakan untuk kepentingan pengelolaan kelompok, seperti penyediaan konsumsi pertemuan bulanan, pembelian ternak kambing, pembangunan kandang ternak kambing, dan kebutuhan darurat lainnya. Keseluruhan anggaran merupakan dana yang diperoleh dari iuran bulanan dari setiap anggota kelompok.

Struktur organisasi kelompok ternak “Satwa Makmur” diketuai oleh Sukalim dan sekretarisnya Sujiyanto sejak 2016 hingga 2019. Adapun anggota yang aktif berjumlah 28 orang dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Abdul Rohman, Legiman, Hardi, Priyanto, Ruspan, Sarjan, Suradi dan Surasto sebagai petani. Andi Prayitno, Gito, Marlin, Pariyadi, Suprianto, Supadi, Sutiiyono, Sutrasman, dan Zaenal Arifin sebagai wirausahawan. Adapun yang bekerja di Swasta; Endro Dwi Bowo, Sakur, dan Sujiyanto. Sedangkan yang lain ada Hartanto di Industri, M. Suyono PNS, Ngatipan dan Sukarno bekerja sebagai serabutan, Rofi'i sebagai tukang kayu, Rosidi Anwar sebagai karyawan swasta, Sukalim sebagai purnabakti, dan Supriyanto bekerja sebagai buruh lepas.

Pengurus kelompok ternak “Satwa Makmur” semua bisa menjadi ketua. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kepengurusan kelompok ternak dipilih secara musyawarah berdasarkan pemungutan suara anggota. Apabila keputusan sudah sepakat mengenai kepengurusan yang diadakan dan disetujui kelompok bersama-sama akan diketahui dan diputuskan oleh Pemerintah Desa Tubanan.

¹⁷ Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 23.

Kegiatan kelompok sudah dilaksanakan dengan baik melalui SOP (*Standard Operating Procedure*). Hal ini merupakan hasil konsensus para anggota. Konsensus ini telah disepakati dengan membuat instrumen harian yang berisi instruksi pengelolaan kandang ternak dan sifatnya wajib dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Selain itu, adanya SOP membuktikan bahwa kelompok ternak “Satwa Makmur” peduli terhadap kepentingan bersama untuk pengelolaan kandang ternak. Menurut Supriyanto, “Pembuatan SOP dapat memunculkan kesadaran kelompok untuk memikul tanggungjawab yang sama.”¹⁸ Hal tersebut dilakukan untuk mempertegas tugas dan tanggungjawab anggota kelompok. Kegiatan organisasi harus dipikul secara bersama-sama. Adanya kesamaan ini dapat meningkatkan interaksi melalui pola atau struktur kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Isi SOP tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pagi hari tugas anggota kelompok wajib membersihkan kandang dari kotoran dan pakan ternak yang berserakan, memeriksa kondisi kesehatan ternak kambing, dan memastikan ketersediaan air minum yang baik. (2) Sore hari anggota kelompok wajib mengambil pakan ternak berupa rumput gajah, daun ketela, dan daun jagung. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulan dengan meletakkannya pada tempat yang sudah tersedia dan memastikan kembali kondisi air minum yang cukup dan bersih.

Namun, pengamatan peneliti, aplikasi SOP dilapangan belum berjalan secara maksimal. Sebab, ada sebagian anggota kelompok yang masih kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi hasil konsensus tersebut. Anggota yang kurang memiliki kesadaran karena minimnya partisipasi dalam kegiatan. Alasan lain juga menunjukkan bahwa aktivitas di luar kandang ternak karena masalah kemalasan anggota kelompok ternak untuk mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Hal tersebut perlu adanya tindak lanjut dan

¹⁸ Supriyanto, Wawancara, 4 Maret 2019.

¹⁹ Joyakin Tampubolon et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)),” *Jurnal Penyuluhan* 2, no. 2 (2006): 10–22, <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i2.2122>.

mengkaji kembali konsensus yang dibuat agar *reliable* di masa mendatang dapat berjalan secara maksimal. Pasalnya, salah satu keberhasilan organisasi adalah kekuatan bersinergi antar anggota dengan terciptanya partisipasi atas dasar kesadaran dan kemandirian sebagai asas tujuan pemberdayaan.

Pemberdayaan Melalui Program CSR

Program pemberdayaan yang dilakukan CSR PT PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara memiliki dua fokus utama, yaitu pengembangan kapasitas manusia dan pengembangan kapasitas lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan potensi yang ada di Dusun Tubanan itu sendiri. Program-program tersebut dijelaskan berikut ini.

Program Pengembangan Kapasitas Manusia

Pengembangan kapasitas manusia di kelompok ternak “Satwa Makmur” meliputi kegiatan pelatihan, yaitu *pelatihan produksi biogas dan pelatihan produksi pupuk organik*. Alasan melaksanakan kegiatan ini karena pengetahuan yang dimiliki anggota kelompok tentang pengelolaan peternakan sangat minim. Selain itu, anggota kelompok masih kurang paham tentang cara mengelola peternakan secara modern. Pada umumnya, masyarakat awam ketika beternak hanya untuk memenuhi pendapatan ekonomi melalui margin usaha. Namun mengesampingkan limbah turunan ternak. Padahal, jika ada pengetahuan yang cukup untuk mengelola limbah turunan ternak akan mensubstitusi budaya formal (jual-beli) di sektor peternakan.

Pertama, pelatihan produksi biogas. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memahami mekanisme pengelolaan ternak apabila mereka mampu merumuskan masalah yang sedang dihadapi secara bersama. Perilaku ini mencerminkan kesuksesan program pelatihan dengan mendorong mekanisme pengelolaan beternak melalui cara modern. Misalnya, dibuktikan dengan penjadwalan waktu kebersihan kandang setiap waktu dan setiap hari. Selain itu, masalah yang paling *urgen* adalah kesadaran anggota kelompok

untuk mengumpulkan kotoran ternak ke dalam sebuah bak atau disebut *sumur biogas*. Setiap sore anggota kelompok yang sudah memiliki jadwal untuk mendapat giliran, secara sukarela membersihkan kotoran dan melakukan aktivitas produksi *biogas*.

Keterampilan para peternak yang awalnya minim pengetahuan *biogas* menjadi meningkat setelah ada pelatihan dari ahli peternakan. Ilustrasi produksi *biogas* pada hilir akan menghasilkan gas yang dapat menggantikan kebutuhan gas elpiji. Proses pembuatan *biogas* dimulai dengan mengumpulkan kotoran ternak. Selanjutnya, kotoran tersebut dimasukkan ke alat rotasi untuk menampung kotoran ternak yang dicampur dengan air bersih. Setelah kotoran menjadi lembut seperti bubur, secara otomatis masuk ke dalam *digester biogas*. Proses ini cukup mudah. Pekerja hanya membutuhkan waktu untuk menunggu 3 hari. Setelah itu akan muncul *biogas* yang siap untuk digunakan. Biasanya, kebutuhan kotoran ternak dalam sekali produksi *biogas* mencapai 25 kg dengan kebutuhan air bersih 5 liter. Kegiatan ini akan menghasilkan *biogas* kurang lebih 10 kg. Beberapa rumah warga yang berada di sekitar kawasan kandang ternak bisa menikmati *biogas* gratis. Hal ini sebagai upaya promosi sebelum nantinya dilakukan *tabungisasi biogas*.

Limbah produksi *biogas* adalah bahan baku pupuk organik yang berkualitas tinggi karena kondisi gas metan yang sudah hilang. Sebagai sebuah ilustrasi, proses pembuatan pupuk padat dapat dilakukan jika kebutuhan kotoran ternak sebesar 25 kg dalam sekali produksi *biogas* makan dapat menghasilkan jumlah limbah *biogas* sebesar 12,5 kg. Bahkan sebagai langkah promosi kepada masyarakat sekitar kandang ternak, masyarakat diijinkan menggunakan pupuk organik yang telah disediakan secara gratis. Prospek pupuk organik kedepannya dapat dikomersialkan yang bekerjasama dengan perusahaan swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat luas sebagai konsumen.

Kedua, pelatihan pupuk organik. Pelatihan ini diarahkan kepada mekanisme manajemen pengelolaan peternakan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan *support system* kepada anggota kelompok

sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kegiatan pun dimulai dengan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen legalitas organisasi. Setelah memahami aspek-aspek organisasi, anggota kelompok selanjutnya diberikan pelatihan pembuatan kandang ternak. Kegiatan ini diharapkan memberi dampak secara implementatif sehingga memudahkan peternak dalam mengelola kebersihan dan kesehatan kandang. Dengan begitu, anggota kelompok dapat diberikan bekal pengelolaan tentang cara penggemukan hewan ternak. Tentu saja, capaian aktivitas pelatihan tersebut menjadi modal para pegiat peternakan untuk meningkatkan pendapatan dan mampu menguasai pasar agar lebih kompetitif.

Oleh karena itu, capaian kegiatan pengembangan kapasitas manusia tersebut agar setiap anggota kelompok mampu meningkatkan kapasitas diri tentang pengelolaan peternakan secara modern. Tujuan utamanya merubah perilaku mereka yang semula acuh terhadap kondisi ternak menjadi lebih giat dan aktif secara bersama-sama untuk mengelola sentra peternakan terpadu. Setiap anggota harus memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban sesuai SOP yang sudah terjadwal melalui mekanisme musyawarah anggota "Satwa Makmur". Target lain yang hendak dicapai melalui program tersebut adalah menciptakan kemandirian secara komunitas.

Program Pengembangan Kapasitas Berwawasan Kesadaran Lingkungan

Program ini merupakan upaya pengendalian kondisi lingkungan dari polusi udara yang muncul karena faktor produksi pembangkit listrik dikawasan Desa Tubahan. Selain itu, lingkungan masih menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Salah satu isu lingkungan yang hendak diselesaikan adalah masalah polusi udara dan kerusakan ekologi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam menanggapi isu lingkungan sebagai masalah yang mudah dan ringan. Padahal, *World Health Organization* (WHO)/Lembaga Kesehatan Dunia menyatakan bahwa polusi udara telah membunuh 7 Juta Jiwa di

seluruh dunia.²⁰

Dengan begitu, masalah polusi udara harus menjadi agenda bersama untuk menyelesaikannya. Masalah semacam ini karena sudah dianggap sebagai bencana internasional. Untuk itu, pemerintah perlu upaya represif dan preventif sebagai langkah strategis menekan angka kematian manusia dan pencemaran lingkungan. Sedangkan polusi lingkungan (kerusakan ekologi) merupakan perubahan kondisi tanah karena menurunnya unsur hara yang berfungsi menyuburkan tanah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ada 2.200 desa mengalami pencemaran tanah. Salah satu penyebabnya karena penggunaan pupuk kimia yang berlebih sehingga mengurangi kualitas kesuburan tanah.²¹

Berdasarkan dua masalah polusi di atas, penelitian ini merangkumnya menjadi masalah polusi tentang gas metan hewan ternak. Gas metan adalah gas cukup berbahaya yang mengandung hidrokarbon sederhana. Namun, di dalamnya terdapat unsur yang bisa di daur ulang, karena mengandung bahan-bahan organik yang tidak memerlukan waktu panjang untuk mengurainya seperti kotoran hewan ternak. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara, jumlah kambing berjumlah 68.287 ekor sehingga menyumbang gas metan sebesar 546 ribu kg/tahun. Lebih spesifik, jumlah ternak di Kecamatan Kembang berjumlah 8.690 ekor akan menghasilkan gas metan sebesar 69 ribu kg/tahun.²²

Dengan kondisi tersebut, seyogyanya, bisa dimanfaatkan sebagai sebuah bahan untuk program pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kelompok ternak “Satwa Makmur” mampu melihat aset tersebut yang diimplementasikan ke dalam program pemberdayaan. Salah satu program

²⁰ Sandri Linna Sengkey, Freddy Jansen, dan Steenie Wallah, “Tingkat Pencemaran Udara Co Akibat Lalu Lintas dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro,” *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING* 1, no. 2 (2011): 119–26.

²¹ Zuraya Nidia, “BPS: 2.200 Desa Alami Pencemaran Tanah,” *Republika Online*, 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/plon5d383/bps-2200-desa-alami-pencemaran-tanah>.

²² Badan Pusat Statistik, “Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Jepara.”

yang berjalan adalah pengelolaan ternak dengan program digester biogas yang berfungsi sebagai penghasil biogas. Data lapangan membuktikan bahwa kelompok ternak “Satwa Makmur” mempunyai digester biogas berukuran 2x3 meter kubik dengan kemampuan menampung kotoran ternak hingga mencapai 25 kg. Hasil biogas dalam sekali produksi menghasilkan 5 kg.

Produksi biogas yang dilakukan oleh kelompok “Satwa Makmur” telah berkontribusi kepada pengolahan gas di dunia. Untuk itu, kelompok “Satwa Makmur” sudah memiliki 50 ekor ternak kambing yang dapat menghasilkan 400 kg gas metan. Jika gas metan yang dihasilkan kandang ternak dikonversi maka jumlah gas metan akan menghasilkan 80 kg biogas. Suprianto menjelaskan:

“Penggunaan hasil produksi biogas digunakan oleh masyarakat sekitar kandang. Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi biogas mencapai 5 RT. Salah satunya yang menggunakan adalah Istri Suprianto. Kepentingan penggunaan biogas dipakai untuk menghidupi usaha kue/bolu kukus. Penggunaan biogas yang berlanjut mampu menekan penggunaan tabung elpiji sebanyak 2 tabung gas elpiji per bulan. Harga elpiji rata-rata yang beredar di masyarakat mencapai Rp. 21.000,-. Jadi setiap bulan Istri Suprianto mampu menghemat pengeluaran untuk kebutuhan gas elpiji sebesar Rp. 42.000,-.”²³

Dengan begitu, pengembangan biogas secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan epistemologi pemberdayaan, memberikan daya kepada individu atau kelompok adalah modal utama. Sementara turut berperan dan meningkatkan kesejahteraan adalah hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi biogas secara masal, penting melakukan perubahan perilaku masyarakat setelah munculnya pengembangan kelompok ternak modern. Salah satu upaya tersebut adalah membangun budaya tentang penggunaan pupuk organik sebagai substitusi pupuk kimia yang didapatkan dari limbah produksi biogas. Setiap hari, kelompok ternak satwa makmur menghasilkan pupuk organik rata-rata 10 kg. Tentunya, kebutuhan pupuk organik tidak seimbang

²³ Suprianto, Wawancara, 7 Maret 2019.

dengan penyediaannya. Sementara penggunaan pupuk organik hanya diberikan gratis kepada masyarakat sebagai promosi awal produk. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, mulai terlihat aktifitas anggota kelompok menjual pupuk organik dengan harga Rp. 10.000,- untuk kalangan institusi dan Rp. 5.000,- untuk kalangan masyarakat umum. Perbedaan harga yang diberlakukan sebagai langkah konkret kelompok ternak sebagai strategi promosi dan meningkatkan kualitas pupuk organik dipasaran. Dalam satu bulan, kelompok ternak mampu menjual 30 karung sak ukuran 10 kg. Meskipun belum maksimal, namun masih harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kebutuhann dan peningkatan kesejahteraan anggota kelompok dan masyarakat sekitar pengembangan biogas.

Penutup

Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B di Desa Tubanan berjalan dengan membentuk kelompok ternak “Satwa Makmur”. Untuk itu, program pemberdayaan ini dapat mengubah pola pengelolaan ternak tradisional menjadi modern. Namun, masalah utama yang muncul ketika proses pemberdayaan karena setiap individu masih belum memiliki kesadaran penuh untuk memulai pengelolaan hewan ternak secara modern. Salah satu upaya yang dilakuakn dalam program tersebut dengan cara meningkatkan kesadaran berpartisipasi dalam kelompok ternak. Hubungan antar anggota kelompok ternak diwadahi oleh acara rutin setiap bulan. Kegiatan tahlilan dan arisan sebagai sumber relasi horizontal atau hubungan antar anggota menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran. Setelah sekian kali melakukan diskusi kelompok muncul ide untuk melakukan kerjasama dengan pihak korporasi adalah CSR/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT PLN. Dampak dari kerjasama yang hadir di kelompok ternak tersebut, pemberian bantuan yang terbagi dalam aspek kapasitas manusia dan aspek kapasitas lingkungan

Aspek pengembangan kapasitas manusia merupakan aktifitas pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam kelompok ternak “Satwa

Makmur”. Adapun kegiatan pendukungnya adalah pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan biogas, dan manajemen pemasaran produk. Pelatihan pembuatan pupuk organik merupakan pemanfaatan lanjutan dari limbah ternak untuk dijadikan bahan baku produksi biogas. Selain itu, limbah produksi biogas akan bermanfaat sebagai pupuk organik pengganti pupuk kimia. Produk biogas dan pupuk organik mampu menjadi komoditas baru yang dapat dikelola oleh kelompok ternak Satwa Makmur. Adapun prioritas unggulan yang dihasilkan merubah menggunakan pupuk kimia menjadi pupuk organik.

Sementara itu, aspek pengembangan kapasitas lingkungan merupakan upaya pengendalian kondisi lingkungan sekitar dari polusi yang muncul. Salah satu polusi yang menjadi perhatian masyarakat adalah polusi udara akibat gas metan dari hewan ternak kambing. Langkah strategis menyelesaikan masalah yang berkembang dengan memproduksi biogas dan bahan baku utamanya kotoran ternak. Secara simultan, kelompok ternak satwa makmur berkontribusi untuk mengurangi gas metan di bumi.

Daftar Pustaka

- Asniwaty, Besse. “Evaluasi Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility CSR PT. Pupuk Kaltim.” *Jurnal Eksis* 6, no. 1 (2010).
- Badan Pusat Statistik. “Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Jepara.” Jepara, 2017. <https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2017/03/01/476/tabel-table-5-4-1-populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-jepara-2015.html>.
- Brejning, J. *Corporate Social Responsibility and the Welfare State: The Historical and Contemporary Role of CSR in the Mixed Economy of Welfare*. Farnham: Ashgate Publishing Company, 2012.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. “Trickle Down Efeck dan Perubahan Wajah Masjid di Yogyakarta.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (June 1, 2018): 1–24. <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V12I1.1-24>.
- Jayani, Dwi Hadya. “Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia.” Databoks, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa->

terbesar-keempat-dunia.

- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Lin, Nan. *Social Capital A Theory of Social Structure and Action*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Marwah, Novia. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Mandiri Bersama Bank Mandiri di Mrican Umbulharjo.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 1 (June 19, 2019): 109–28. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-06>.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nidia, Zuraya. “BPS: 2.200 Desa Alami Pencemaran Tanah.” *Republika Online*. 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/plon5d383/bps-2200-desa-alami-pencemaran-tanah>.
- Puspitaningtyas, Zarah, Oktavia Dwi Lestari, dan Aryo Prakoso. “Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016.” *Ekspektra : Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (March 14, 2018): 89. <https://doi.org/10.25139/ekt.v2i1.700>.
- Sengkey, Sandri Linna, Freddy Jansen, dan Steenie Wallah. “Tingkat Pencemaran Udara Co Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro.” *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 1, no. 2 (2011): 119–26.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Syahputra, Erwin, dan Suteki Suteki. “Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (February 24, 2018): 1–8. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.1-8>.
- Tampubolon, Joyakin, Basita Ginting Sugihen, Margono Samet, Djoko Susanto, dan Sumardjo Sumardjo. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)).” *Jurnal Penyuluhan* 2, no. 2 (June 1, 2006): 10–22. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i2.2122>.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2012.

Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 1 (June 1, 2011): 15. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>.